BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

RENCANA KERJA

(R E N J A)

TAHUN 2027



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung 56221
Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327
disnakertmg@gmail.com
dinperinaker.temanggungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur	Petugas Verifikator,
Ir. GUNADI, MM	ROSITA PUTRI DIANI, S.E
NIP. 196807212007011017	NIP. 19940501 201903 2 006

Mengetahui,
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dimaksudkan memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan yang dirinci dalam program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, terutama apabila dilakukan review atas Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2027 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 17 Juli 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660712 199403 2 006

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 7
1.3. Maksud dan Tujuan 9
1.4. Sistematika Penulisan 10
BAB II 11
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029. 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .. 20
2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) 20
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 40
2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD 43
2.5. *Review* terhadap rancangan awal RKPD 44
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 53
2.7. Inovasi Perangkat Daerah 53
2.8. Penghargaan 55
BAB III 56
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 56
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 56
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja . 56
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 59
4.1. Program dan Kegiatan 92
5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 98
5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2026 Kabupaten Temanggung 12

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung..... 21

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung..... 23

Tabel 2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025..... 43

Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027..... 45

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Temanggung..... 53

Tabel 2.7 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2024 – 2026..... 53

Tabel 2.8 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026..... 55

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2027..... 57

Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2027..... 61

Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2027..... 93

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027..... 98

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027..... 99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan..... 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

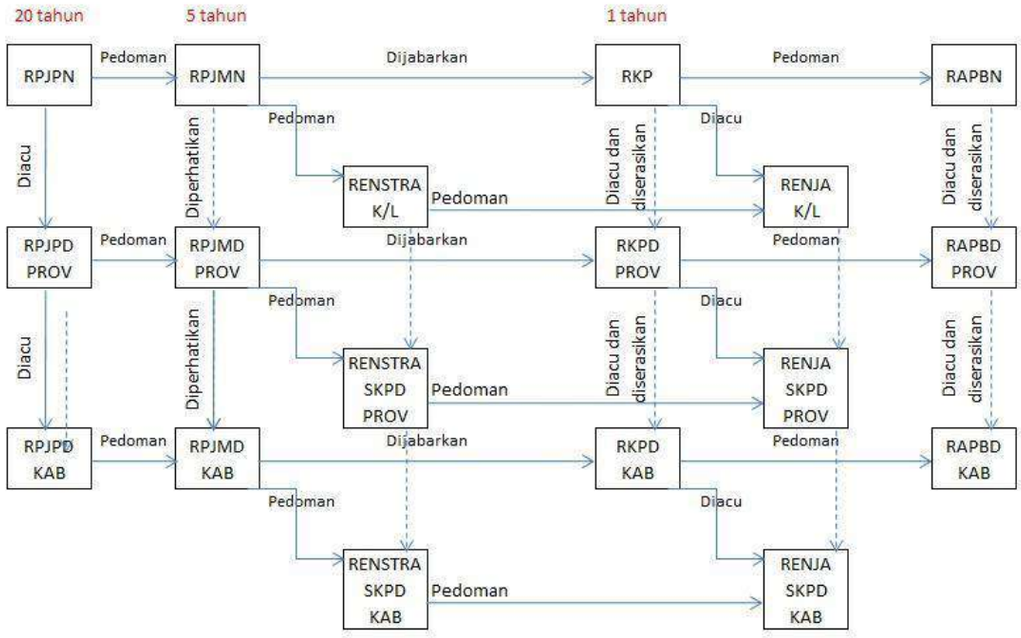
Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan

nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja , pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja , yang menyangkut aspek:

1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
2) Kondisi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;

4) Data Pokok Pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;dan
7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .
2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk kondisi tahun 2025-2029;
4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .

c. Me*review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;

Review hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Me*review* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

4) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;
5) Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi urusan terkait).

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja , dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's *(Sustainable Developmnet Goals)*;
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan

serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk Tahun

2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama kurun waktu Tahun 2027;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VI PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029.

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2025-2029. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026 Kabupaten Temanggung

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
								Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
											K	Rp (DPA)	K	Rp	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7= 6/5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12= 10/8*
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**										
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										
2	**07**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										
2	07	01	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bln	12	12	100	12	5.910.823.412	3	1.628.597.199	25
2	**07**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										
2	07	01	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	5.000.000	0	-	0
2	07	01	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	20.639.000	3	4.728.000	25
2	07	01	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	17.491.450	3	795.000	25
2	07	01	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	12	11.732.502	3	1.319.000	25
2	07	01	206	9	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Laporan	12	12	100	12	34.666.000	3	2.735.500	25

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
								Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
											K	Rp (DPA)	K	Rp	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7= 6/5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12= 10/8*
						Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
2	**07**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										
2	07	01	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	12	1.000.000	0	-	0
2	07	01	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	82.954.325	3	14.824.223	25
2	07	01	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	457.018.019	3	118.899.110	25
2	**07**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										
2	07	01	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	16	94,12	17	72.884.531	2	5.625.600	11,76
2	07	01	209	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8	8	100	-	-	0	-	0
2	07	01	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	9	90	26	10.000.000	1	350.000	3,85

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
								Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
											K	Rp (DPA)	K	Rp	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7= 6/5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12= 10/8*
2	07	01	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100	1	40.000.000	0	-	0
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**										
2	**07**	**03**	**201**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**										
2	07	03	201	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	144	224	100	96	300.000.000	0	-	0
3	**07**	**03**	**202**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**										
3	07	03	202	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Lembaga	20	33	100	20	5.500.000	0	-	0
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**										
2	**07**	**04**	**201**		**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**										
2	07	04	201	2	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	200	1.269	100	200	4.500.000	370	125.000	185
2	07	04	201	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	750	1.858	100	450	4.500.000	197	640.000	26,27

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
								Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
											K	Rp (DPA)	K	Rp	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7= 6/5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12= 10/8*
2	07	04	201	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang	5	5	100	3	11.000.000	0	-	0
2	07	04	201	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	0	-	0,00	60	340.000.000	0	3.320.000	0
2	**07**	**04**	**204**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**										
2	07	04	204	1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	4	4	100	16	10.125.000	0	-	0
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**										
2	**07**	**05**	**202**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**										
2	07	05	202	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang dicegah	Perkara	10	12	100	8	60.000.000	1	3.918.000	12,5

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
								Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
											K	Rp (DPA)	K	Rp	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7= 6/5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12= 10/8*
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**										
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**										
3	**31**	**02**	**201**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**										
3	31	02	102	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	100,00	1	25.000.000	0	-	0
3	31	02	201	4	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	-	-	0,00	1	850.000.000	0,1	2.561.500	10
3	31	02	201	5	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	2	100,00	1	7.500.000	0	-	0
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**										
3	**31**	**04**	**201**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**										
3	31	04	201	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	1	100,00	1	12.500.000	0	100.000	0

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di tahun 2025 maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sebagian besar sub kegiatan telah memenuhi target kinerja, yaitu:
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Fasilitasi Kunjungan Tamu
      - Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
      - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      - Pemeliharaan Mebel
      - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   b. Program Penempatan Tenaga Kerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dan Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI).
   c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
   d. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
    a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dan Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
    b. Program Penempatan Tenaga Kerja pada Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja dan Sub Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.
    c. Program Hubungan Industrial pada Sub Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
4. Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
    a. Faktor penyebab tercapainya target kinerja:
        - Perencanaan program dan kegiatan telah disusun sesuai kebutuhan dan jadwal pelaksanaan,
        - Koordinasi antarbidang serta dukungan dari perangkat daerah, maupun pemangku kepentingan terkait berjalan dengan baik.
        - Ketersediaan anggaran dan sumber daya yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung sesuai rencana.
        - Komitmen pelaksana kegiatan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.
    b. Faktor penyebab melebihi target kinerja:
        - Tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat, pencari kerja, serta pelaku usaha terhadap program dan layanan yang diselenggarakan.
        - Efektivitas pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia sehingga menghasilkan capaian yang melebihi target.

c. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian kebutuhan riil di lapangan, sehingga pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas maupun peralatan tidak memerlukan biaya dan frekuensi pemeliharaan sebesar yang telah direncanakan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

   Secara keseluruhan, capaian program dan kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan mempertahankan kinerja pelaksanaan program serta optimalisasi kegiatan yang belum mencapai target, target Renstra Tahun 2026 diperkirakan dapat tercapai.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:
   - Memperkuat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program secara berkala agar potensi kendala dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih cepat.
   - Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran serta melakukan penyesuaian alokasi belanja pada subkegiatan sesuai kebutuhan aktual sehingga anggaran lebih efektif dan efisien.
   - Memperluas sinergi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung peningkatan capaian program.
   - Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyempurnaan perencanaan serta penganggaran pada tahun berikutnya.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori ***Baik*** yaitu dengan nilai **99,91%.** Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja
   - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100%.
2. Meningkatnya sektor industri dalam pembangunan ekonomi
   - Presentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100%.
3. Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik
   - IKM Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100%.
   - Nilai AKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja capaian kinerja tahun 2025 sebesar 99,66%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kunci. Adapaun penjelasan masing-masing indikator tercantum pada tabel 2.2 dan 2.3 sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/ SEDANG /R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN TENAGA KERJA									
INDIKATOR KINERJA UTAMA									
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	86,71	86,72	86,73	86,71	86,71	99,99	SANGAT TINGGI
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	72,8	73	73,2	72,55	72,55	99,38	SANGAT TINGGI
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	78.10 - 78.48	78.42- 78.80	78.74- 79.12	77,77	77,77	99,17	SANGAT TINGGI
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	57	60,32	63,45	86,15	86,15	100	SANGAT TINGGI
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	1	1	1,05	91,67	91,67	100	SANGAT TINGGI
2	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	72,56	50	54	69,31	0,00	0,00	SANGAT RENDAH
3	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	81	82	83	97,06	29,41	35,87	SANGAT RENDAH
4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	36	37	37,5	60,40	98,67	100,00	SANGAT TINGGI
5	Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	31	32	33	88,43	52,53	100,00	SANGAT TINGGI
6	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	36	37	37,5	68,44	100,00	100,00	SANGAT TINGGI

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/ SEDANG /R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
7	Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	92	94	94,5	100	42,44	45,15	SANGAT RENDAH
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	%	69,01	69,59	70,17	69,20	69,20	99,44	SANGAT TINGGI
9	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	%	41	42,52	42,97	64,89	64,39	100	SANGAT TINGGI
10	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	70	75	75	74,05	74,24	98,99	SANGAT TINGGI
11	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	46	47	47	77,10	76,52	100	SANGAT TINGGI
12	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	SANGAT TINGGI
URUSAN PERINDUSTRIAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA									
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,35	27,44	27,8	25,34	25,34	92,35	SANGAT TINGGI
2	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	%	0,38	0,4	0,41	0,38	0,12	29,86	SANGAT RENDAH
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	78,2	48,27	51,55	78,21	48,08	99,61	SANGAT TINGGI
2	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	%	0,2	0,6	1	0,21	0,23	37,53	SANGAT RENDAH
3	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	%	1,8	2	2,2	1,80	1,19	59,47	SANGAT RENDAH

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/ SEDANG/ R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	1	1	1,05	91,67	91,67	100	ST
2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	36	37	37,5	60,40	98,67	100	ST
3	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	21,5	21,6	21,7	*Indikator lama*			
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	3.453.642,93	3.478.642,93	3.508.642,93				
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	%	*Indikator baru sehingga target belum ada di RPJMD*						
6	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	%							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	%	*Indikator baru sehingga target belum ada di RPJMD*						
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sector	%	*Indikator baru sehingga target belum ada di RPJMD*						

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/ SEDANG/ R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	%	*Indikator baru sehingga target belum ada di RPJMD*						
4	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	%	0,38	0,4	0,41	0,382	0,12	29,86	SR
5	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	85,6	85,7	85,8	*Indikator lama*			
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100				
7	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait	%	1,2	1,21	1,22				

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perangkat Daerah

   Berdasarkan Tabel 2.2, Nilai IKM Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 terealisasi sebesar 86,71 dari target 86,72, sehingga capaian kinerja mencapai 99,99% dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Nilai IKM yang digunakan pada Triwulan I Tahun 2026 masih mengacu pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, karena pelaksanaan survei dan penetapan nilai IKM Tahun 2026 belum dilaksanakan pada periode pelaporan ini.

   Faktor Pendorong:

   - Hasil penilaian IKM Tahun 2025 menunjukkan kualitas pelayanan publik telah berjalan dengan baik, pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan prosedur yang berlaku.
   - Adanya komitmen perangkat daerah dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

   Faktor penghambat:

   - Nilai IKM Tahun 2026 belum tersedia karena survei kepuasan masyarakat belum dilaksanakan sehingga capaian belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pelayanan pada Tahun 2026.

   Rekomendasi tindaklanjut:

   - Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2026 sesuai jadwal.
   - Menindaklanjuti hasil survei sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan, serta mempertahankan kualitas pelayanan yang telah dicapai.

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

   Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 72,55 dari target 73,00, dengan capaian 99,38% dan kategori Sangat Tinggi. Nilai AKIP yang digunakan dalam laporan ini masih mengacu pada hasil evaluasi AKIP Tahun

2025, mengingat hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 belum diterbitkan.

Faktor pendorong:

- Adanya komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.
- Implementasi SAKIP telah berjalan dengan baik.

Faktor penghambat:

- Hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 belum tersedia sehingga masih menggunakan nilai tahun sebelumnya.
- penyempurnaan implementasi SAKIP masih perlu terus dilakukan agar nilai dapat meningkat.

Rekomendasi Tindaklanjut: Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada seluruh tahapan manajemen kinerja, serta Mengoptimalkan penyusunan dokumen kinerja sebagai persiapan evaluasi AKIP Tahun 2026.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

   Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 terealisasi sebesar 77,77% dari target 78,42–78,80%, sehingga capaian kinerja mencapai 99,17% dengan kategori Sangat Tinggi. Data TPAK yang digunakan dalam laporan ini masih mengacu pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), karena data TPAK Tahun 2026 belum tersedia pada saat penyusunan laporan.

   Faktor pendorong:

   - Adanya dukungan program pelayanan ketenagakerjaan, seperti penyebarluasan informasi pasar kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, dan pelatihan kerja.
   - Terjalinnya kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam mendukung penyerapan tenaga kerja.

   Faktor penghambat:

   - Perkembangan kondisi ketenagakerjaan pada Tahun 2026 belum dapat tergambarkan secara aktual dalam periode pelaporan ini.

- Dinamika kondisi ekonomi dan pasar kerja dapat memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja.

Rekomendasi Tindaklanjut:

- Mengoptimalkan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- Memperkuat koordinasi dengan BPS dalam pemanfaatan data ketenagakerjaan sebagai dasar evaluasi kinerja.

4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 terealisasi sebesar 86,15% dengan target 60,32%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dan berada pada kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di Kabupaten Temanggung telah berjalan dengan baik dan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Faktor pendorong:

- Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Terjalinnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan terkait.
- Adanya pelaksanaan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada perusahaan dan tenaga kerja.

Faktor penghambat:

- Masih terdapat pekerja sektor informal dan usaha mikro yang belum seluruhnya terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Tingkat kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial masih perlu ditingkatkan.

Rekomendasi tindaklanjut:

- Memperluas sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan serta pekerja sektor informal mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan perusahaan dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

5. Rasio PDRB Industri Pengolahan

   Rasio PDRB Industri Pengolahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 terealisasi sebesar 25,34% dari target 27,44%, sehingga capaian kinerja mencapai 92,35% dan termasuk kategori Sangat Tinggi. Data yang digunakan pada laporan Triwulan I Tahun 2026 masih mengacu pada data PDRB Tahun 2025 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), karena data PDRB Tahun 2026 belum tersedia pada saat penyusunan laporan.

   Faktor pendorong:

   - Kinerja sektor industri pengolahan di Kabupaten Temanggung masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB daerah.
   - Keberlangsungan aktivitas industri kecil, menengah, dan industri pengolahan mendukung stabilitas kontribusi sektor industri.
   - Pembinaan dan fasilitasi kepada pelaku industri terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk.

   Faktor penghambat:

   - Data PDRB Tahun 2026 belum dipublikasikan oleh BPS sehingga capaian masih menggunakan data Tahun 2025.
   - Pertumbuhan sektor industri dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, permintaan pasar, dan harga bahan baku.
   - Kontribusi sektor ekonomi lainnya turut memengaruhi besarnya rasio PDRB industri pengolahan.

   Rekomendasi tindaklanjut:

   - Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri pengolahan.
   - Memperluas pembinaan dan pendampingan kepada pelaku industri.

6. Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten.

   Persentase pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 terealisasi sebesar

0,12% dari target 0,40%, sehingga capaian kinerja mencapai 29,86% dan berada pada kategori Sangat Rendah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penambahan jumlah IKM baru belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Faktor pendorong:

- Adanya kegiatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada pelaku IKM oleh perangkat daerah.
- Dukungan berbagai program pemberdayaan dan pengembangan industri kecil dan menengah.

Faktor penghambat:

- Minat masyarakat untuk mendirikan usaha industri baru masih terbatas.
- Kondisi ekonomi dan permodalan menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usaha.
- Sebagian pelaku usaha belum melakukan pencatatan atau pendaftaran usaha.

Rekomendasi tindaklanjut:

- Meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku IKM.
- Mengoptimalkan pendataan dan registrasi IKM agar perkembangan jumlah IKM dapat terpantau secara akurat.

B. INDIKATOR PROGRAM

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja.

   Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 91,67 dengan capaian 100% dan kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ketenagakerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Tenaga Kerja.

   Faktor Pendorong:

   - Adanya komitmen pimpinan dan dukungan dokumen perencanaan yang jelas.

   Faktor Penghambat:

   - Keterbatasan ketersediaan dan akses data, serta koordinasi dengan instansi terkait yang belum optimal.

Rekomendasi Tindaklanjut:

- Penguatan koordinasi, perbaikan pengelolaan data, serta evaluasi secara berkala agar kegiatan yang dilaksanakan semakin selaras dengan rencana tenaga kerja daerah.

2. Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

   Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 realisasi indikator masih 0%, sehingga capaian terhadap target belum tercapai dan berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi ini disebabkan karena pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi belum dilaksanakan pada Triwulan I.

   Faktor Pendorong:

   - Tersedianya program pelatihan berbasis kompetensi yang didanai melalui APBN serta dukungan kerja sama dengan BBPVP Semarang dalam penyelenggaraan pelatihan.

   Faktor Penghambat:

   - Kegiatan pelatihan yang bersumber dana DBHCHT masih proses prakegiatan. Keterbatasan kuota pelatihan dikarenakan keterbatasan jumlah anggaran yang diperhadapkan dengan animo masyarakat yang cukup tinggi, Khusus pelatihan DBHCHT hanya bisa diakses oleh masyarakat petani/keluarga buruh tembakau sehingga masyarakat umum tidak dapat mengakses pelatihan DBHCHT. Adanya efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berimbas pada pemangkasan paket pelatihan yang sudah teranggarkan di tahun 2026. Proses persiapan kegiatan dan pengadaan masih berlangsung.

   Rekomendasi Tindak Lanjut:

   - Pengajuan perencanaan anggaran pelatihan melalui dana APBN (DIPA BBPVP Semarang) dan DBHCHT. Mempercepat proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan pelatihan yang bersumber dari APBN dan DBHCHT.

3. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina

   Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 29,41 atau mencapai 35,87% dari target sehingga termasuk kategori Sangat Rendah. Pembinaan terhadap LPKS belum seluruhnya terlaksana sesuai rencana.

Faktor pendorong:

- Proaktif melakukan monitoring secara langsung dengan LPKS baik dengan sistem jemput bola dan WAG

Faktor penghambat:

- Kurangnya kesadaran LPKS untuk mengirim laporan rutin tiap semester karena tidak ada sanksi khusus.
- Jadwal pembinaan belum sepenuhnya terlaksana

Rekomendasi Tindaklanjut:

- melakukan pembinaan dan sosialisasi secara aktif terkait dengan akreditasi LPKS serta mengadakan pertemuan dengan LPKS secara rutin.

4. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja

   Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 98,67 dengan capaian 100% dan kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan pelayanan penempatan tenaga kerja telah berjalan sesuai target.

   Faktor Pendorong

   - Optimalisasi pelayanan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja.
   - Meningkatnya partisipasi pencari kerja dalam layanan penempatan.
   - Networking yang cukup baik dengan perusahaan sehingga pelaksanaan rekrutmen di Dinas meningkat

   Faktor Penghambat

   - Dinamika kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan yang berubah-ubah.
   - Pencari kerja masa kini cenderung memilih-milih pekerjaan; Pencari kerja kurang aktif dalam mengikuti seleksi atau rekrutmen, Ketersediaan lowongan kerja belum dapat mengakomodir pencaker laki-laki usia diatas 30 tahun, kualifikasi pencari kerja tidak memenuhi persyaratan lowongan. Daya tahan kerja pencaker muda sangat rendah.

   Rekomendasi Tindak Lanjut

   - Meningkatkan sosialisasi informasi lowongan kerja kepada pencari kerja melalui berbagai media. Memfasilitasi pelaksanaan mini job fair atau rekrutmen secara berkala.

5. Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan

   Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 52,53 dan capaian terhadap target telah mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi.

   Faktor pendorong:

   - Kesadaran masyarakat tentang peran dinas cukup meningkat sehingga dinas mendapat kemudahan akses penyuluhan di tingkat desa

   Faktor penghambat:

   - Keterlambatan dalam pencairan UP kegiatan sehingga penyuluhan dan bimbingan jabatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal pada Triwulan I tahun 2026.

   Rekomendasi Tindak Lanjut:

   - Menjalin komunikasi secara aktif dengan desa untuk bisa mendapatkan akses waktu pada pertemuan pertemuan yang diadakan oleh Desa.
   - Memperluas jangkauan peserta melalui kerja sama dengan sekolah dan dunia usaha.

6. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan

   Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 100% sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan dan berada pada kategori Sangat Tinggi.

   Faktor Pendorong:

   - Optimalisasi pelayanan penempatan tenaga kerja.
   - Networking yang cukup baik dengan perusahaan sehingga pelaksanaan rekrutmen di Dinas meningkat
   - Koordinasi yang baik dalam jalinan kerjasama pembentukan wirausaha baru dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dan BLK Semarang I. Kerjasama dengan SMK terkait pelatihan ketrampilan usaha dan penyuluhan jabatan dalam rangka persiapan memasuki dunia kerja.

   Faktor Penghambat

   - Pencari kerja masa kini cenderung memilih-milih pekerjaan; Pencari kerja kurang aktif dalam mengikuti seleksi atau rekrutmen, Ketersediaan lowongan kerja belum dapat mengakomodir pencaker laki-laki usia diatas 30 tahun,

kualifikasi pencari kerja tidak memenuhi persyaratan lowongan.Daya tahan kerja pencaker muda sangat rendah.

Rekomendasi Tindak Lanjut:

- Memperluas kerja sama dengan perusahaan, terus meningkatkan jalinan komunikasi dengan HRD Perusahaan selain itu juga meningkatkan upaya informasi rekrutmen maupun peluang kerja melalui media sosial maupun jaringan komunikasi desa.
- Meningkatkan kompetensi pencari kerja agar sesuai kebutuhan industri.

7. Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur

Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 42,44 atau 45,15% dari target sehingga berada pada kategori Sangat Rendah. Fasilitasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) belum mencapai target yang ditetapkan.

Faktor Pendorong:

- Pelayanan fasilitasi CPMI tetap dilaksanakan sesuai ketentuan. Layanan dilakukan lebih cepat dan memberikan kemudahan pada CPMI Maupun P3MI untuk berproses.
- Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik.

Faktor Penghambat:

- Pendaftaran dilakukan secara online, tidak bisa dilakukan verifikasi apabila yang bersangkutan tidak melengkapi dokumen sehingga tidak dapat melanjutkan wawancara. dalam perkembangannya aplikasi terbuka secara nasional dan CPMI dapat mendaftar darimana saja, namun Dinperinaker hanya dapat melayani terkait perlindungan CPMI hanya KTP Temanggung .

Rekomendasi Tindak Lanjut:

- Meningkatkan sosialisasi prosedur penempatan CPMI.
- Memperkuat koordinasi dengan BP3MI/P3MI dan instansi terkait.
- Meningkatkan pelayanan informasi kepada calon pekerja migran.

8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan)

   Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 69,20 atau 99,44% dari target sehingga termasuk kategori Sangat Tinggi. Nilai yang digunakan masih mengacu pada data resmi BPS Tahun 2025 karena data Tahun 2026 belum dipublikasikan.

   Faktor Pendorong

   - Tingginya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.
   - Dukungan program pemberdayaan tenaga kerja perempuan.
   - Banyak perempuan di Temanggung mulai memanfaatkan pelatihan keterampilan dari pemerintah daerah maupun lembaga nonformal, seperti pelatihan UMKM, tata boga, dan menjahit. Hal ini mendorong perempuan untuk aktif di pasar kerja.

   Faktor Penghambat

   - Keterbatasan anggaran dari Dinperinaker melalui Balai Latihan Kerja untuk menyelenggarakan ketrampilan berbasis kompetensi khususnya bagi perempuan

   Rekomendasi Tindak Lanjut

   - Mendorong peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan.

9. Persentase perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan

   Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 64,39 atau 100% dari target sehingga termasuk kategori Sangat Tinggi.

   Faktor Pendorong

   - Pembinaan dan sosialisasi norma ketenagakerjaan kepada perusahaan.
   - Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan.

   Faktor Penghambat

   - Masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan seluruh norma ketenagakerjaan.

   Rekomendasi Tindak Lanjut

   - Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dengan perusahaan.
   - Melakukan monitoring secara berkala.

10. Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK

    Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 74,24 atau 98,99% sehingga capaian telah memenuhi target yang ditetapkan dan berada pada kategori Sangat Tinggi.

    Faktor Pendorong:

    - Meningkatnya pekerja yang memperjuangkan haknya melalui Serikat Pekerja dan/atau LKS Bipartit

    Faktor Penghambat:

    - Masih banyak perusahaan masuk kategori mikro menengah yang tidak mewajibkan memberikan upah sesuai UMK sebagimana diatur dalam PP nomor 7 tahun 2021.

    Rekomendasi Tindaklanjut:

    - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan UMK.

11. Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja

    Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 76,52 atau 100% sehingga capaian telah memenuhi target yang ditetapkan dan berada pada kategori Sangat Tinggi.

    Faktor Pendorong

    - Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja.
    - Pembinaan kepada perusahaan dilakukan secara berkelanjutan.

    Faktor Penghambat

    - Masih terdapat perusahaan yang belum memenuhi seluruh ketentuan fasilitas kesejahteraan pekerja.

    Rekomendasi Tindak Lanjut

    - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan.
    - Mendorong perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku.

12. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi

    Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 100% atau capaian telah memenuhi target yang ditetapkan dan berada pada kategori Sangat Tinggi.

    Faktor Pendorong:

    - Munculnya kesadaran para pihak untuk tidak menekankan ego

- Mediator yang dapat menyelaraskan kepentingan para pihak dalam proses perselisihan hubungan industrial

Faktor Penghambat:

- Pihak yang hadir biasanya bukan yang dapat mengambil kebijakan sehingga memperpanjang proses PPHI

Rekomendasi Tindak Lanjut:

- Mempertahankan kualitas layanan mediasi.
- Meningkatkan upaya pencegahan perselisihan melalui pembinaan hubungan industrial.

13. Persentase industri berbasis pada komoditas unggulan daerah

    Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 48,08 atau 99,61% capaian telah memenuhi target yang ditetapkan dan berada pada kategori Sangat Tinggi.

    Faktor Pendorong

    - Pembinaan terhadap industri berbasis komoditas unggulan daerah.
    - Potensi komoditas lokal yang mendukung pengembangan industri.

    Faktor Penghambat

    - Kapasitas produksi dan daya saing sebagian industri masih perlu ditingkatkan.

    Rekomendasi Tindak Lanjut

    - Meningkatkan pendampingan, inovasi produk, dan akses pemasaran.

14. Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri

    Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 0,23 atau 37,53% capaian belum memenuhi target yang ditetapkan sehingga kategori capaian Sangat Rendah.

    Faktor Pendorong:

    - Pembinaan telah dilaksanakan kepada sebagian pelaku industri

    Faktor Penghambat:

    - Pengawasan dan pembinaan belum seluruhnya terlaksana di triwulan I

Rekomendasi tindaklanjut:

- Mempercepat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta meningkatkan koordinasi dengan pelaku industri.

15. Persentase industri yang terdaftar dalam SIINas

    Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 1,19 dari target sebesar 2% atau capaian sebesar 59,47% sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan dan berada dikategori capaian Sangat Rendah.

    Faktor Pendorong:

    - Sosialisasi mengenai Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) telah dilakukan.

    Faktor Penghambat:

    - Masih rendahnya kesadaran pelaku industri untuk melakukan pendaftaran atau pembaruan data pada SIINas.

    Rekomendasi Tindak Lanjut:

    - Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran SIINas.
    - Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku industri agar melakukan registrasi dan pembaruan data secara berkala.

C. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja.

   Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 91,67 dengan capaian 100% dan kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ketenagakerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Tenaga Kerja.

   Faktor Pendorong:

   - Adanya komitmen pimpinan dan dukungan dokumen perencanaan yang jelas.

   Faktor Penghambat:

   - Keterbatasan ketersediaan dan akses data, serta koordinasi dengan instansi terkait yang belum optimal.

Rekomendasi Tindaklanjut:

- Penguatan koordinasi, perbaikan pengelolaan data, serta evaluasi secara berkala agar kegiatan yang dilaksanakan semakin selaras dengan rencana tenaga kerja daerah.

2. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten

   Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 98,67 dengan capaian 100% dan kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan pelayanan penempatan tenaga kerja telah berjalan sesuai target.

   Faktor Pendorong

   - Optimalisasi pelayanan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja.
   - Meningkatnya partisipasi pencari kerja dalam layanan penempatan.
   - Networking yang cukup baik dengan perusahaan sehingga pelaksanaan rekrutmen di Dinas meningkat

   Faktor Penghambat

   - Dinamika kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan yang berubah-ubah.
   - Pencari kerja masa kini cenderung memilih-milih pekerjaan; Pencari kerja kurang aktif dalam mengikuti seleksi atau rekrutmen, Ketersediaan lowongan kerja belum dapat mengakomodir pencaker laki-laki usia diatas 30 tahun, kualifikasi pencari kerja tidak memenuhi persyaratan lowongan. Daya tahan kerja pencaker muda sangat rendah.

   Rekomendasi Tindak Lanjut

   - Meningkatkan sosialisasi informasi lowongan kerja kepada pencari kerja melalui berbagai media. Memfasilitasi pelaksanaan mini job fair atau rekrutmen secara berkala.

3. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

   Indikator ini merupakan indikator lama yang tidak lagi digunakan dalam pengukuran kinerja Tahun 2026 sehingga tidak dilakukan pengukuran capaian pada periode pelaporan.

4. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

   Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga target dan realisasi belum tersedia dalam RPJMD Tahun 2025–2029 pada periode pelaporan.

5. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

   Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga target dan realisasi belum tersedia dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

6. Persentase pekerja bukan penerima upah dan pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan

   Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga target dan realisasi belum tersedia dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

7. Capaian sasaran pembangunan industri daerah

   Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga target dan realisasi belum tersedia dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Pengukuran indikator akan dilakukan setelah target ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

8. Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor

   Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga target dan realisasi belum tersedia dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

9. Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui SIINas

   Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga target dan realisasi belum tersedia dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

10. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota

    Realisasi indikator sampai Triwulan I Tahun 2026 sebesar 0,12% dari target 0,40%, sehingga capaian kinerja sebesar 29,86% dan berada pada kategori Sangat Rendah. Penambahan jumlah IKM belum mencapai target yang telah ditetapkan.

    Faktor pendorong:

    - Adanya kegiatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada pelaku IKM oleh perangkat daerah.

- Dukungan berbagai program pemberdayaan dan pengembangan industri kecil dan menengah.

Faktor penghambat:

- Minat masyarakat untuk mendirikan usaha industri baru masih terbatas.
- Kondisi ekonomi dan permodalan menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usaha.
- Sebagian pelaku usaha belum melakukan pencatatan atau pendaftaran usaha.

Rekomendasi tindaklanjut:

- Meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku IKM.
- Mengoptimalkan pendataan dan registrasi IKM agar perkembangan jumlah IKM dapat terpantau secara akurat.

11. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri tahunan

    Indikator ini merupakan indikator lama sehingga tidak dilakukan pengukuran dalam periode pelaporan Tahun 2026.

12. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

    Indikator ini merupakan indikator lama sehingga tidak lagi digunakan sebagai indikator kinerja Tahun 2026.

13. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang sesuai

    Indikator ini merupakan indikator lama sehingga tidak dilakukan pengukuran pada Tahun 2026.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dari 21 (dua puluh satu) indikator terdapat 6 (enam) indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, karena pelaksanaan pelatihan belum dilaksanakan pada Triwulan I.
- Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina, karena pembinaan baru akan dilaksanakan secara bertahap pada triwulan berikutnya.
- Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur, karena jumlah permohonan layanan CPMI pada Triwulan I masih terbatas.
- Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM), karena pertumbuhan IKM bersifat kumulatif dan dipengaruhi perkembangan usaha sepanjang tahun.
- Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri, karena kegiatan pembinaan dan pengawasan belum seluruhnya dilaksanakan.
- Persentase industri yang terdaftar dalam SIINas, karena proses pendataan dan registrasi industri masih berlangsung.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja , antara lain :
   - Sebagian kegiatan belum memasuki tahap pelaksanaan sehingga capaian indikator masih rendah.
   - Pelaksanaan kegiatan bergantung pada jadwal pelaksanaan program dan ketersediaan anggaran.
   - Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha pada beberapa program masih perlu ditingkatkan.

3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah maupun Program Nasional
   - Capaian beberapa indikator strategis pada Triwulan I belum mencerminkan capaian kinerja akhir tahun.
   - Pelaksanaan program yang belum optimal pada awal tahun berpotensi memengaruhi percepatan pencapaian target apabila tidak segera ditindaklanjuti.

- Diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya agar target RPJMD dan target nasional tetap dapat dicapai.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja , antara lain :

   Tantangan:

   - Melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.
   - Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran melalui percepatan pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran agar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien.
   - Peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pelaku industri.

   Peluang:

   - Dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui sinkronisasi program, pendanaan, serta fasilitasi berbagai kegiatan pengembangan tenaga kerja dan industri.
   - Kerja sama dengan dunia usaha, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, dan instansi terkait memberikan peluang untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mendukung pengembangan dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM).
   - Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan ketenagakerjaan dan perindustrian menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat, serta mendukung pengelolaan data dan pelaksanaan layanan secara lebih transparan dan akuntabel.

5. Formulasi Isu-Isu Penting

   Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, diperlukan beberapa langkah strategis sebagai upaya percepatan pencapaian target kinerja, peningkatan

kualitas pelayanan, serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya.

a. Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana pada Triwulan I.
b. Meningkatkan koordinasi antarbidang agar pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.
c. Mengoptimalkan pembinaan kepada IKM, LPKS, dan pelaku industri.
d. Meningkatkan sosialisasi program ketenagakerjaan dan perindustrian kepada masyarakat dan pelaku usaha.
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya percepatan pencapaian target kinerja sampai akhir Tahun 2026.

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Kamus usulan kegiatan merupakan kelompok usulan permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029). Tujuan penyusunan Kamus kegiatan adalah untuk memastikan agar usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Verifikasi yang dilakukan mulai dari User sekretariat DPRD sampai dengan user Perangkat daerah adalah untuk memastikan kembali bahwa usulan permasalahan/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD telah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Secara rinci rumusan Kamus kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
	NIHIL		

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026

2.5. *Review* terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5.

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					**7.096.234.239**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					**7.096.234.239**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**6.700.609.239**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**6.699.109.239**	
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**1.500.000**	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	1.500.000	Usulan kegiatan baru
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**5.947.223.412**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**5.947.223.412**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Orang/ bulan	5.947.223.412		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Orang/ bulan	5.947.223.412	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**91.528.952**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**91.528.952**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	20.639.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	26.102.950	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	17.491.450		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12.027.500	Penyesuaian kebutuhan belanja

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	13.732.502		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	13.732.502	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	34.666.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	34.666.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**538.972.344**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**533.083.344**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	78.454.325		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	76.954.325	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	459.518.019		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	455.129.019	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**122.884.531**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**125.773.531**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas	17	Unit	72.884.531		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas	17	Unit	71.384.531	Penyesuaian

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5	Unit	10.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	40.000.000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					**305.500.000**
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					**300.000.000**
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160	Orang	300.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				kebutuhan belanja
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5	Unit	12.155.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	42.234.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					**1.500.000**	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					**1.500.000**	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Dokumen	1.500.000	Usulan kegiatan baru
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					**305.000.000**	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					**300.000.000**	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160	Orang	300.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**
1	2	3	4	5	6	7
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					**5.500.000**
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	20	Lembaga	5.500.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					**30.125.000**
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					**20.000.000**
	Pelayanan antar Kerja	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	300	Orang	4.500.000
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	450	orang	4.500.000
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	2	Orang	11.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					**5.000.000**	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	20	Lembaga	5.000.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					**30.625.000**	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					**22.500.000**	
	Pelayanan antar Kerja	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	300	Orang	4.500.000	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	450	orang	4.500.000	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	2	Orang	7.000.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Perluasan Kesempatan Kerja	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20	Orang	6.500.000	Usulan kegiatan baru

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**
1	2	3	4	5	6	7
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota					**10.125.000**
	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	10	Orang	10.125.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					**60.000.000**
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					**60.000.000**
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	8	Perkara	60.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					**895.000.000**
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					**882.500.000**
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					**882.500.000**
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	25.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota					**8.125.000**	
	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	10	Orang	8.125.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					**60.000.000**	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					**60.000.000**	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	8	Perkara	60.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					**895.000.000**	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					**877.500.000**	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					**877.500.000**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	15.000.000	Penyesuaian kebutuhan belanja

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	850.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	7.500.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	850.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	7.500.000	
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1	Dokumen	5.000.000	Usulan kegiatan baru
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					**5.000.000**	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin					**5.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					**12.500.000**
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					**12.500.000**

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Dokumen	5.000.000	Usulan kegiatan baru
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					**12.500.000**	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					**12.500.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**
1	2	3	4	5	6	7
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	12.500.000
JUMLAH						**7.991.234.239**

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	12.500.000	
JUMLAH						**7.991.234.239**	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

Tabel 2.6
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2027
Kabupaten Temanggung

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			NIHIL		

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026

2.7. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ada 9 (sembilan) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2023-2026

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Si Parjono (Siap Pados Kerjo Jaman Now)	Bidang Tenaga Kerja, Perusahaan, Pencari Kerja	APBD	Penyediaan informasi lowongan kerja, pelayanan AK1, dan fasilitasi penempatan kerja secara cepat dan mudah.	Layanan informasi dan penempatan kerja	Meningkatnya akses informasi lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja serta menurunnya angka pengangguran.	Dinperinaker - 2023
2	Teman Alula (Tempat Jualan Alumni Pelatihan)	BLK, Alumni Pelatihan, UMKM	APBD	Penyediaan media promosi dan pemasaran bagi alumni pelatihan.	Media pemasaran produk alumni pelatihan	Meningkatnya pemasaran produk, pendapatan alumni, dan kemandirian usaha.	Dinperinaker- 2023
3	Training Anti Gabut	Instruktur BLK, Perusahaan, Pencari Kerja	APBD	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.	Pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan peluang memperoleh pekerjaan.	Dinperinaker- 2024

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
4	Mantra 5S	Pegawai Dinperinaker	APBD	Penerapan budaya kerja 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dalam pelayanan.	Standar budaya pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.	Dinperinaker-2025
5	Pemanfaatan Google Spreadsheet dan Google Form untuk Optimalisasi Layanan Cuti Pegawai	Subbag Umum dan Kepegawaian, Seluruh Pegawai	APBD	Digitalisasi pengajuan, pencatatan, dan monitoring cuti pegawai menggunakan Google Workspace	Sistem administrasi cuti digital	Pelayanan administrasi cuti menjadi lebih cepat, tertib, dan terdokumentasi dengan baik.	Dinperinaker-2025
6	Optimalisasi Digitalisasi Untuk Media Pembelajaran Pembuatan Desain Busana Dalam Pelatihan Menjahit Di Balai Latihan Kerja (Blk) Kabuapaten Temanggung	Instruktur Menjahit, Peserta Pelatihan	APBD	Pengembangan media pembelajaran digital berupa materi, video, dan evaluasi pembelajaran. Pemberian materi desain busana sebagai bagian dari pelatihan menjahit.	Media pembelajaran digital, Hasil desain busana dan produk pelatihan	Meningkatnya efektivitas proses pembelajaran dan kompetensi peserta pelatihan, Meningkatnya kreativitas dan kompetensi peserta dalam bidang tata busana.	BLK-2025
7	Optimalisasi Informasi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kejuruan Teknik Las BLK Kabupaten Temanggung	Instruktur Las, Peserta Pelatihan	APBD	Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pelatihan teknik las.	Standar penerapan K3 dalam pelatihan	Meningkatnya keselamatan kerja dan kompetensi peserta sesuai standar industri.	BLK-2025
8	Sistem Inventarisasi Dokumen Kinerja Terintegrasi (SiDokin)	Seluruh Bidang, Subbag Perencanaan	APBD	Pengelolaan dan inventarisasi dokumen kinerja secara digital dan terintegrasi.	Sistem informasi dokumen kinerja	Meningkatnya efektivitas pengelolaan dokumen, kemudahan pencarian data, serta mendukung akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Dinperinaker-2025
9	Buku Tamu Digital	Pegawai, Tamu/ Pengunjung	APBD	Digitalisasi pencatatan tamu menggunakan aplikasi atau formulir elektronik.	Sistem buku tamu digital	Meningkatnya tertib administrasi, keamanan, serta kemudahan monitoring kunjungan tamu.	Dinperinaker-2025

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026

2.8. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ada 3 (tiga) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2026

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Apresiasi karena telah mencapai dan melampaui target pendataan 50 Industri Kecil pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Tahun 2024	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	Dinperinaker
2	Piagam Penghargaan sebagai Peringkat II Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terendah Tahun 2025	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinperinaker
3.	Piagam Penghargaan atas keberhasilan masuk tahap Penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tingkat Nasional Tahun 2025	Bupati Temanggung	Kabupaten	Dinperinaker

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2025-2029 adalah Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial serta Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi *dengan* sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik, meningkatnya perlindungan bagi tenaga kerja, dan meningkatnya sektor industri dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2027

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
Meningkatnya Kualitas Tenaga kerja, hubungan industrial serta sektor industri dalam pembangunan ekonomi			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	%	78,74-79,12	79,32-79,76
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,8	28,45
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	%	86,73	86,75
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	73,2	73,6
	Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	63,45	70,18
		2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	1,05	1,15
		2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	54	62
		2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	83	85
		2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	37,5	38,5
		2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	33	35

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
		2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	37,5	38,5
		2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	94,5	95,5
		2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	70,17	71,33
		2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	%	42,97	43,85
		2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	75	73,8
		2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	47	49
		2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	100
	Meningkatnya Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi		Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	0,41	0,43
		3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	51,55	58,11
		3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	%	1	1,8
		3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	%	2,2	2,6

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan

   Pada Renja Tahun 2027 direncanakan sebanyak 8 (delapan) program, yang dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

   Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilaksanakan dengan cakupan pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Sebagian kegiatan bersifat kabupaten, seperti penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, pelayanan administrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur. Adapun kegiatan yang bersifat teknis dan operasional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah, antara lain melalui pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta fasilitasi pengembangan sektor perindustrian dan ketenagakerjaan.
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

   Total kebutuhan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan 8 (delapan) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan Renja Tahun 2027 sebesar Rp 7.991.234.239 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung. Selain itu, terdapat dukungan pendanaan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

pada program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, rincian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, dan kebutuhan pendanaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				**7.991.234.239,00**							**2.060.510.827,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**7.096.234.239,00**							**1.155.510.827,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**7.096.234.239,00**							**1.155.510.827,00**	
1,	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**6.699.109.239,00**							**753.385.827,00**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	86,73 Angka							-	751.885.827,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.500.000,00					-		1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	1.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.947.223.412,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	5.947.223.412,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.947.223.412,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	5.947.223.412,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			91.528.952,00					Pegawai		91.528.952,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	5.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			26.102.950,00							20.639.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 2 Paket	26.102.950,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	20.639.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.027.500,00							17.491.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.027.500,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	17.491.450,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			13.732.502,00							13.732.502,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.732.502,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	13.732.502,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			34.666.000,00							34.666.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	34.666.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	34.666.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			533.083.344,00					Pegawai		538.972.344,00	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			76.954.325,00							78.454.325,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	76.954.325,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	78.454.325,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			455.129.019,00							459.518.019,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	455.129.019,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	459.518.019,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			125.773.531,00					Pegawai		121.384.531,00	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan			71.384.531,00							71.384.531,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	71.384.531,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	71.384.531,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.155.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	12.155.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	10.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			42.234.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	42.234.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	40.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2,	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**1.500.000,00**							**0,00**	
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1,05 %	1.500.000,00						-	0,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			1.500.000,00					Tenaga Kerja		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	1.500.000,00						-	0,00	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			1.500.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3,	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**305.000.000,00**							**305.500.000,00**	
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	83 %	305.000.000,00						-	305.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
			Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	54 %	305.000.000,00						-	305.500.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			300.000.000,00					Pencari Kerja		300.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi			300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	96 Orang	300.000.000,00	Kab. Temanggung	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			5.000.000,00					Lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)		5.500.000,00	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			5.000.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	5.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4,	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**30.625.000,00**							**36.625.000,00**	
			Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur	94,5 %	8.125.000,00						-	10.125.000,00	
			Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	94,5 %	18.000.000,00						-	22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
			Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	33 %	26.125.000,00						-	32.125.000,00	
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	37,5 %	26.125.000,00						-	32.125.000,00	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	70,17 %	26.125.000,00						-	32.125.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			22.500.000,00					Pencari kerja		26.500.000,00	
	2.07.04.2.01 .0002	Pelayanan antar Kerja			4.500.000,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	300 Orang	4.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	4.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			4.500.000,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	450 Orang	4.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	4.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			7.000.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	2 Orang	7.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	11.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			6.500.000,00							6.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	6.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	6.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			8.125.000,00					Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI),		10.125.000,00	
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran			8.125.000,00							10.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)											
		Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang	8.125.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	10.125.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5,	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**60.000.000,00**							**60.000.000,00**	
			Persentase penyelesaian perselisihan hubungan	100 %	60.000.000,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
			industrial melalui mediasi										
			Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	75 %	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Persentase perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan	42,97 %	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	47 %	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			60.000.000,00					Perusahaan dan Pekerja		60.000.000,00	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1			60.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	8 Perkara	60.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	60.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**895.000.000,00**							**905.000.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**895.000.000,00**							**905.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
6,	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**877.500.000,00**							**887.500.000,00**	
			Persentase industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	51,55 %	877.500.000,00						-	887.500.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			877.500.000,00					Pelaku Industri		887.500.000,00	
	3.31.02.2.01 .0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	25.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			850.000.000,00							850.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	850.000.000,00	Kab. Temanggung	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	850.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			7.500.000,00							7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	7.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota			5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	5.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
7,	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**5.000.000,00**							**5.000.000,00**	
			Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	1 %	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			5.000.000,00					Industri Kecil Menengah (IKM)		5.000.000,00	
	3.31.03.2.01 .0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan		-	5.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
		usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan				
8,	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**12.500.000,00**							**12.500.000,00**	
			Persentase industri yang terdaftar dalam SIINas	2,2 %	12.500.000,00						-	12.500.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			12.500.000,00					IKM		12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			12.500.000,00							12.500.000,00	
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	12.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	J U M L A H				**7.991.234.239,00**							**2.060.510.827,00**	

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temangung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2027

RANCANGAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Pagu Indikatif**	**Pagu Indikatif**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	**7.096.234.239**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**7.096.234.239**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.699.109.239**	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.699.109.239**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.947.223.412		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.947.223.412	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.947.223.412		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.947.223.412	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.528.952		Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.528.952	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.102.950		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.102.950	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.027.500		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.027.500	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.732.502		Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.732.502	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.666.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.666.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.083.344		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.083.344	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.954.325		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.954.325	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455.129.019		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455.129.019	

RANCANGAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.773.531		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.773.531	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.384.531		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.384.531	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.155.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.155.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.234.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.234.000	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**1.500.000**		**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**1.500.000**	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1.500.000		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1.500.000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1.500.000		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1.500.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**305.000.000**		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**305.000.000**	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	300.000.000		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	300.000.000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	300.000.000		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	300.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	5.000.000		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	5.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	5.000.000		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	5.000.000	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**30.625.000**		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**30.625.000**	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	22.500.000		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	22.500.000	
	Pelayanan antar Kerja	4.500.000		Pelayanan antar Kerja	4.500.000	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	4.500.000		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	4.500.000	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	7.000.000		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	7.000.000	
	Perluasan Kesempatan Kerja	6.500.000		Perluasan Kesempatan Kerja	6.500.000	
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	8.125.000		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	8.125.000	

RANCANGAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	8.125.000		Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	8.125.000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**60.000.000**		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**60.000.000**	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**895.000.000**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**895.000.000**	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**877.500.000**		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**877.500.000**	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	877.500.000		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	877.500.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	15.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	15.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	850.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	850.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7.500.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7.500.000	
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	5.000.000		Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	5.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**5.000.000**		**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**5.000.000**	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha	5.000.000		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha	5.000.000	

RANCANGAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
	Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**12.500.000**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**12.500.000**	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	12.500.000			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	12.500.000	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12.500.000			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12.500.000	
		7.991.234.239				**7.991.234.239**	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temangung Tahun 2027

Dari Tabel 4.1. tabel Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2027 dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2027.

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
V	**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**				
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
	Tenaga Kerja				
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	77,77	78,74-79,12	DINPERINAKER
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	86,15	63,45	DINPERINAKER
Urusan Pemerintahan Pilihan					
	Perindustrian				
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	25,34	27,8	DINPERINAKER
2	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	%	0,38	0,41	DINPERINAKER
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	86,71	86,73	DINPERINAKER
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	72,55	73,2	DINPERINAKER

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut berjalan efektif. Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								
1	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	%	91,67	1,05	DINPERINAKER
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi Jumlah tenaga kerja keseluruhan	%	*Indikator lama tidak digunakan*		DINPERINAKER
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) Jumlah tenaga kerja	%	*Indikator lama tidak digunakan*		DINPERINAKER
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Jumlah Perusahaan	%	*29,77*	28,45	DINPERINAKER
		5	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	%	*100*	*Indikator baru target belum ada di RPJMD*	DINPERINAKER

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
		6	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan Jumlah pencaker yang terdaftar	%	60,40	37,5	DINPERINAKER
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
2	Perindustrian	7	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	%	0,38	0,41	DINPERINAKER
		8	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK makan nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% . Untuk masing masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	%	*Indikator lama tidak digunakan*		DINPERINAKER
		9	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	%	*Indikator lama tidak digunakan*		DINPERINAKER
		10	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan, Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan, Informasi produksi dan kapasitas produksi, Informasi bahan baku dan bahan penolong, Informasi bahan bakar/energi, Informasi tenaga kerja, Informasi investasi	%	*Indikator lama tidak digunakan*		DINPERINAKER

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
		11	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan dengan realisasi yang dicapai.	%	*94,40*	*Indikator baru target belum ada di RPJMD*	DINPERINAKER
		12	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri Total investasi seluruh sektor	%	*22,38*	*Indikator baru target belum ada di RPJMD*	DINPERINAKER
		13	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	%	*0,18*	*Indikator baru target belum ada di RPJMD*	DINPERINAKER

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2026

Pada Tahun 2027 dilakukan penyesuaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagai upaya penyelarasan dengan dokumen perencanaan dan kebutuhan pengukuran kinerja perangkat daerah. Penyesuaian tersebut mengakibatkan beberapa indikator pada tahun sebelumnya tidak lagi digunakan serta digantikan dengan indikator baru. Oleh karena itu, terdapat indikator yang belum memiliki data evaluasi tahun sebelumnya maupun target dalam dokumen RPJMD. Adapun indikator baru yang mulai digunakan pada Tahun 2027 meliputi:

1. Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
2. Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1.Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota
3. Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor.
4. Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

BAB VI
PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 94,93%, realisasi Belanja Modal sebesar 0% (tidak ada alokasi anggaran belanja modal), sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 21,46% realisasi Belanja Modal sebesar 0% (belum terlaksana).

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 7.991.234.239,- yang terdiri dari 8 (delapan) program antara lain program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota; program perencanaan tenaga kerja; program pelatihan kerja dan produktivitas

tenaga kerja; program penempatan tenaga kerja; program hubungan industrial; program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri; dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 17 Juli 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660712 199403 2 006

Lampiran

KERTAS KERJA MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2027

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Kegiatan	PROSES BISNIS (disesuaikan kebutuhan)	KATEGORI RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANG GUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELE SAIAN
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial serta Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi	1. Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik,	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Koordinasi dan penyusunan dokumen	Risiko Pemangku Kepentingan	Data dan masukan dari perangkat daerah atau pemangku kepentingan tidak diperoleh secara lengkap.	ROO.27.07.11.03	17	Koordinasi lintas sektor belum optimal dan keterlambatan penyampaian data.	Analisis kebutuhan tenaga kerja daerah kurang akurat.	Melakukan koordinasi dan mengingatkan perangkat daerah terkait untuk menyampaikan data tepat waktu.	Dinperinaker	Triwulan III
						Pengumpulan dan validasi data	Riisko Fraud	Terjadi manipulasi atau penyajian data ketenagakerjaan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.	ROO.27.07.11.04	17	Verifikasi data dan pengawasan belum memadai.	Dokumen RTK Makro tidak mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang sebenarnya.	Melakukan verifikasi data	Dinperinaker	Triwulan III
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Risiko Kebijakan	Pelatihan yang dilakukan belum mencerminkan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di lapangan kerja	ROO.27.07.11.07	21	perubahan regulasi pemerintah, ketidaksinkronan kebijakan, kebijakan internal lembaga yang tidak jelas, perubahan priopritas anggaran pemerintah, kemudahan kebijakan tidaqk berdasarkan pada kebutuhan dunia kerja	penyesuaian pelatihan dengan regulasi yang baru dalam waktu singkat, pelaksanaan pelatihan yang tidak selaras dengan kebijakan pusat dan daerah, pelatihan yang tidak sesuai standar yang berlaku, kompetensi pelatihan yang diajarkan tidak terserap oleh pasar.	Melakukan training needs analysis (TNA) secara rutin dengan melibatkan sektor industri, Melibatkan DU/DI sebagai mitra pelatihan, Meningkatkan kompetensi instruktur	Dinperinaker	12 Bulan
							Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian pelaksanaan pelatihan berbasis unit kompetensi dengan SKKNI	ROO.27.07.11.08	17	perubahan regulasi nasional, ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah, kebijakan internal lembaga tidak sesuai SKKNI, kebijakan anggaran yang tidak stabil, kebijakan kurikulum yang tidak terintegrasi	penyesuaian sistem pelatihan dalam waktu singkat, pelqatihan yang menyimpang dari SKKNI, pelaksanaan pelatihan yang tidak optimal	review dan revisi kurikulum secara berkala, Lakukan pelatihan dan upskilling instruktur secara berkala, Terapkan sistem evaluasi kinerja instruktur oleh peserta dan manajemen, menggunakan metode berbasis praktik: project-based learning, case study, simulasi, dan magang, menganggarkan pembaruan peralatan secara bertahap sesuai prioritas.	Dinperinaker	12 Bulan
							Risiko Pemangku Kepentingan	"- Adanya regulasi yang dinamis, - Kurang optimalnya penerapan SKKNI di Lembaga Pelatihan - Ketidaksesuaian pelatihan di BLK dengan kebutuhan industri"	ROO.27.07.11.09	17	- Perubahan dari regulasi yang sebelumnya - Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan	- Penyesuaian terhadap regulasi yang berubah - peserta pelatihan tidak terserap di industri	Koordinasi dengan Supra (Pemda, Pemprov, Pusat)	Dinperinaker	12 Bulan
							Riisko Fraud	Pemalsuan sertifikat kompetensi, rekayasa keadilan dan absensi peserta pelatihan, manipulasi nilai/ hasil , penyimpangan dana pelatihan, rekayasa dokumentasi pelatihan, dan penggunaan peralatan yang fiktif	ROO.27.07.11.10	20	Mendapatkan keuntungan pribadi, monitoring pelaksanaan pelatihan yang tidak berkesinambungan, sistem administrasi pelatihan yang masih manual, praktik manipulatif dengan peserta pelatihan, pedoman etika bagi staff dan instruktur yaNg kurang	kerugian keuangan, meningkatnya potensi pemalsuan dokumen, laporan fiktif, proses penilaian dan kualitas kelulusan yang tidak kredibilitas	Menerapkan verifikasi sertifikat dengan mencocokkan data peserta pelatihan sesuai dengan SK nominatif siswa pelatihan serta melakukan pemeriksaan berkala atas penerbitan sertifikat.	Dinperinaker	12 Bulan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Kegiatan	PROSES BISNIS (disesuaikan kebutuhan)	KATEGORI RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANG GUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELE SAIAN
							Risiko Operasional	Materi pelatihan yang tidak sesuai, instruktur yang tidak kompeten, waktu pelatihan yang kurang, metode pelatihan tidak relevan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dokumentasi administrasi yang tidak lengkap	ROO.27.07.11.11	17	- Pelanggaran terhadap SOP K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja)	Tidak bisa menyelesaikan pelatihan secara penuh	Sosialisasi dan sarana K3 lebih ditingkatkan	Dinperinaker	12 Bulan
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Riisko Fraud	Kemungkinan manipulasi data jumlah atau kualitas LPK yang dibina sehingga laporan tidak mencerminkan kondisi riil.	ROO.27.07.11.16	17	Pengawasan dan verifikasi data pembinaan LPK belum optimal.	Laporan output tidak sesuai realita, merusak integritas program	Mengadakan Forum pertemuan	Dinperinaker	12 Bulan
							Risiko Operasional	Tidak optimalnya pelaksanaan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	ROO.27.07.11.17	17	Keterbatasan sumber daya dan koordinasi pembinaan LPK belum efektif.	Kualitas pembinaan rendah, target kuantitas tidak tercapai	Prioritaskan LPK strategis - Optimalisasi anggaran	Dinperinaker	12 Bulan
							Risiko Bencana	Gangguan pembinaan akibat bencana alam	ROO.27.07.11.18	20	Terjadinya bencana alam yang menghambat pelaksanaan pembinaan.	Pembinaan tertunda, target LPK berkurang	Memastikan LPK memiliki APAR dan tersedia titik kumpul apabila terjadi bencana (LPK sudah melaksanakan latihan simulasi apabila terjadi bencana)	Dinperinaker	12 Bulan
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Risiko Kebijakan	Tuntutan Hukum atas kebijakan atau peristiwa penempatan yang tidak sesuai prosedur	ROO.27.07.11.19	20	Perubahan regulasi pusat atau daerah yang memengaruhi prosedur penempatan kerja	Target penempatan tidak tercapai	Konsultasi dan sinkronisasi kebijakan antar instansi	Dinperinaker	12 bulan
			Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan				Risiko Kepatuhan	Penempatan tenaga kerja unprosedural	ROO.27.07.11.20	21	Kesalahan pelaksanaan teknis, penempatan tidak sesuai prosedur, atau penggunaan TKA tanpa izin	Penurunan kepercayaan publik dan potensi tuntutan hukum	SOP penempatan diperbarui, pelatihan teknis rutin petugas	Dinperinaker	12 bulan
			Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan				Risiko Pemangku Kepentingan	Menurunnya kepercayaan tersebut karena persepsi masyarakat terhadap kualitas, transparansi, dan kepatuhan layanan Dinperinaker yang dinilai belum optimal,	ROO.27.07.11.21	20	Tingkat kepercayaan masyarakat pada layanan Dinperinaker berkurang	Turunnya kepercayaan publik, pengenaan penetapan putusan hukum	Audit reguler & kerja sama bantuan hukum	Dinperinaker	12 bulan
			Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur												

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Kegiatan	PROSES BISNIS (disesuaikan kebutuhan)	KATEGORI RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANG GUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELE SAIAN
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan												
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			Risiko Pemangku Kepentingan	Sekolah dan masyarakat desa tidak ingin bekerjasama dalam kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan	ROO.27.07.11.27	20	SDM yang kurang kompeten, keterbatasan dalam mengatasi pemberitaan ketenagakerjaan yang hoax melalui media sosial	Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat pada OPD	Sosialisasi masif dan MoU dengan sekolah/desa	Dinperinaker	Triwulan III
							Riisko Fraud	Korupsi dalam waktu pemberian penyuluhan dan bimbingan jabatan	ROO.27.07.11.28	20	pengawasan internal tidak berjalan, integritas petugas rendah	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun	Supervisi rutin dan transparansi kegiatan	Dinperinaker	Triwulan IV
							Risiko Bencana	Adanya kecelakaan kerja menuju lokasi yang sulit diakses	ROO.27.07.11.30	20	Lokasi yang sulit diakses, keterbatasan sarana transportasi yang memadai	Penyuluhan dan Bimbingan jabatan tidak dapat dilaksanakan	Menyediakan peralatan keselamatan standar untuk perjalanan ke lokasi sulit diakses.	Dinperinaker	Triwulan II
				Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD			Risiko Pemangku Kepentingan	Konflik yang timbul dari stigma masyarakat (diskriminasi, miskomunikasi)	ROO.27.07.11.33	20	- Apabila pelayanan terhadap pencari kerja disabilitas terjadi diskriminasi - Pemerintah tidak bisa melaksanakan amanat UU No 8 Tahun 2016	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun	Penetapan SOP dan peningkatan kualitas layanan ULD	Bidang Penta	Triwulan III
							Riisko Fraud	Resiko korupsi dalam penyelenggaraan layanan	ROO.27.07.11.34	20	Apabila terjadi korupsi dalam proses penyelenggaraan layanan	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun	Audit anggaran berkala dan pembentukan tim pengawas internal	Dinperinaker	Triwulan IV
							Risiko Operasional	Perusahaan membatasi akses penempatan tenaga kerja disabilitas	ROO.27.07.11.35	22	Kekhawatiran perusahaan untuk menerima tenaga kerja disabilitas baik dari segi biaya penyediaan akses maupun komunikasi dengan tenaga kerja	Penempatan pencari kerja disabilitas menurun dikarenakan sangat terbatasnya lowongan kerja bagi penyandang disabilitas	Pelatihan petugas dan asesmen kepuasan penerima layanan	Bidang Penta	Triwulan III
				Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja			Risiko Pemangku Kepentingan	Tidak optimalnya pemberdayaan tenaga kerja melalui program perluasan kesempatan kerja	ROO.27.07.11.39	21	Pelaksanaan program tidak sesuai dengan aturan sehingga penerima layanan dirugikan	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun, pengenaan keputusan hukum	Penyesuaian SOP program & pelatihan pelaksana lapangan	Dinperinaker	Triwulan IV
							Riisko Fraud	Resiko korupsi dalam penyelenggaraan layanan	ROO.27.07.11.40	20	korupsi dalam pelaksanaan program	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun	Audit internal berkala dan transparansi laporan	Bidang Penta	Triwulan III
							Risiko Operasional	Tingkat kepercayaan masyarakat pada layanan program perluasan kesempatan kerja Dinperinaker berkurang	ROO.27.07.11.41	20	Pelaksanaan program tidak berpedoman pada aturan yang berlaku	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun	Diseminasi informasi dan promosi program perluasan kerja	Bidang Penta	Triwulan II

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Kegiatan	PROSES BISNIS (disesuaikan kebutuhan)	KATEGORI RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANG GUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELE SAIAN
				Jumlah CPMI/ PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Risiko Pemangku Kepentingan	Tingkat kepercayaan masyarakat pada layanan program perluasan kesempatan kerja Dinperinaker berkurang	ROO.27.07.11.45	20	Pelaksanaan program tidak berpedoman pada aturan yang berlaku	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun	Penyesuaian SOP program & pelatihan pelaksana lapangan	Dinperinaker	Triwulan IV
							Riisko Fraud	Penyelewangan anggaran untuk pelayanan CPMI	ROO.27.07.11.46	20	Apabila terjadi korupsi dalam proses penyelenggaraan layanan	Turunnya kepercayaan publik, pengenaan penetapan putusan hukum	Audit internal berkala dan transparansi laporan	Dinperinaker	Triwulan IV
							Risiko Operasional	Terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan perlindungan dan peningkatan kompetensi CPMI/PMI (PMI bermasalah, Penipuan penempatan)	ROO.27.07.11.47	21	Mekanisme proses penempatan tidak susuai peraturan yang berlaku	Turunnya kepercayaan publik, pengenaan penetapan putusan hukum	Diseminasi informasi dan promosi program perluasan kerja	Bidang Penta	Triwulan III
	2. Meningkatnya perlindungan bagi tenaga kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban pengupahan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akibat perbedaan klasifikasi usaha.	ROO.27.07.11.50	16	banyak bertumbuhnya usaha pengolahan kayu yang pada NIB nya muncul klasifikasi mikro sehingga tidak diwajibkan memberikan upah sesuai dengan UMK dan kepesertaan BPJS TK diperbolehkan hanya 2 program	perusahaan menengah besar menuntut hak yang sama dengan usaha mikro dalam hal pembayaran upah pekerja/buruh dan kepesertaan BPJS TK	Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi	Bidang HI	12 Bulan
			Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK				Risiko Operasional	Kebijakan/regulasi turunan ketenagakerjaan belum sepenuhnya dipahami oleh serikat pekerja/pengusaha.	ROO.27.07.11.53	16	Kurangnya sosialisasi aturan baru & keterbatasan anggaran operasional pembinaan.	Terlambatnya pendaftaran PP/PKB sehingga memicu potensi konflik kerja.	Bekerjasama dengan Satwasker Wilayah Magelang sebagai pengawas ketenagakerjaan	Bidang HI	12 Bulan
			Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja												
			Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi												
	3. Meningkatnya sektor industri dalam pembangunan ekonomi	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri yang Berbasis Pada Komoditas Unggulan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota		Riisko Fraud	Penyelewengan dana kegiatan promosi atau pelatihan	ROO.27.31.11.58	20	kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran	Program tidak berjalan sesuai yang diharapkan, output dan outcome program tidak tercapai	Melakukan pengawasan independen dan audit periodik	Bidang Perindustrian	12 bulan
							Risiko Operasional	Akses pasar terbatas untuk produk kerajinan	ROO.27.31.11.59	20	Minim pelatihan dan regenerasi	kualitas produk rendah dan sulit bersaing	Publikasi berkala kegiatan melalui media sodial, websate, dan laporan publik	Bidang Perindustrian	12 bulan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Kegiatan	PROSES BISNIS (disesuaikan kebutuhan)	KATEGORI RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANG GUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELE SAIAN
							Risiko Bencana	tidak optimalnya/ terhambatnya pemasaran produk	ROO.27.3 1.11.60	20	keterbatasan digitalisasi pemasaran	produk sulit dikenal luas	mefasilitasi dalam melakukan pemasaran produk	Bidang Perindustrian	12 bulan
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Risiko Kebijakan	Layanan dan pemanfaatan APHT tidak berjalan optimal.	ROO.27.3 1.11.61	21	Ketidaksesuaian kebijakan perencanaan dan penganggaran dengan kebutuhan operasional APHT.	Keberlangsungan operasional APHT terganggu	Melakukan pemahaman kebijakan kepada IKM	Bidang Perindustrian	12 bulan
							Risiko Kepatuhan	Potensi kurang maksimalnya pemanfaatan APHT	ROO.27.3 1.11.62	20	Tidak ada pelaku industri tembakau yang menempati APHT	Pembangunan APHT tidak memberikan dampak peningkatan ekonomi	Memberikan pendampingan langsung terkait akses program dan pemanfaatan APHT	Bidang Perindustrian	12 bulan
							Riisko Fraud	Risiko penyalahgunaan penggunaan anggaran	ROO.27.3 1.11.64	20	Kurangnya pengawasan, kurangnya kesadaran anti korupsi	Output kegiatan tidak sesuai target yang ditetapkan	melaksanakan sosialisasi rutin terkait tata kelola anggaran yang bersih	Bidang Perindustrian	12 bulan
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Risiko Kebijakan	Terganggunya keberlanjutan usaha ekonomi kreatif	ROO.27.3 1.11.67	20	Kurangnya infrastruktur pendukung seperti fasilitas produksi, jaringan pemasaran dan sistem distribusi	Ketergantungan yang besar kepada dukungan pemerintah dapat membuat pelaku ekraf rentan terhadap perubahan kebijakan	Pelatihan industri 4.0 untuk pelaku ekraf	Bidang Perindustrian	12 bulan
							Risiko Kepatuhan	Terjadinya pelanggaran ketentuan usaha oleh pelaku ekonomi kreatif	ROO.27.3 1.11.68	20	Kurangnya pengetahuan tentang regulasi, Ketidak pastian yang berdampak pada sasaran ekonomi kreatif akibat kegagalan memenuhi peraturan atau undang undang yang berlaku	Kegagalan mematuhi peraturan dapat menyebabkan sanksi hukum, seperti denda atau penutupan usaha	Bimtek tentang perizinan berusaha sektor industri dan perlindungan produk	Bidang Perindustrian	12 bulan
							Riisko Fraud	Risiko penyalahgunaan penggunaan anggaran	ROO.27.3 1.11.70	20	Kurangnya pengawasan, kurangnya kesadaran anti korupsi	Program tidak berjalan sesuai yang diharapkan, output dan outcome program tidak tercapai	melaksanakan sosialisasi rutin terkait tata kelola anggaran yang bersih	Bidang Perindustrian	12 bulan
				Jumlah Objek Pengawasan Jaminan Produk Halal yang Dapat Diawasi			Risiko Kebijakan	sertifikasi halal meskipun gratis tetapi belum semua ikm bisa mengajukan program tersebut	ROO.27.3 1.11.73	20	banyak produk Ikm belum berlabel halal , karena memang bermunculan industri rumah tangga	konsumen kesulitan memastikan status kehalalan produk; daya saing dan akses pasar produk IKM menurun.	bagi yang belum terfasilitasi akan difasilitasi memaksimalkan anggaran yang tersedia	Bidang Perindustrian	12 bulan
							Risiko Kepatuhan	banyaknya ikm yang belum tersentuh dalam pembinaan sosialisasi pentingnya produk yang halal	ROO.27.3 1.11.74	20	kontinyuitas usaha IKM yang tidak bisa selalu berproduksi karena modal juga terbatas	Proses sertifikasi atau pemeliharaan pemenuhan standar terhambat;	berkoordinasi dan berkolaborasi dengan klaster yang ada	Bidang Perindustrian	12 bulan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Kegiatan	PROSES BISNIS (disesuaikan kebutuhan)	KATEGORI RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANG GUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELE SAIAN
							Riisko Fraud	Pelaku usaha memberikan imbalan untuk memperoleh sertifikat halal tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan	ROO.27.3 1.11.76	20	banyaknya perijinan meski tidak berbayar namun karena IKM kecil masih kurang memahami alur yang harus dilakukan	Pelaku usaha memberikan imbalan untuk memperoleh sertifikat halal tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan	melakukan pendampingan bagi IKM yang akan berproses halal	Bidang Perindustrian	12 bulan
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Risiko Kepatuhan	Pelaku usaha belum memenuhi ketentuan perizinan usaha industri.	ROO.27.3 1.11.80	20	bekum semua pelaku usaha taat dan patuh ketentuan	Izin usaha tidak diterbitkan atau kegiatan industri berjalan tidak sesuai ketentuan.	pendampingan lebih ditingkatkan	Bidang Perindustrian	12 bulan
							Risiko Pemangku Kepentingan	Penerbitan izin usaha industri terhambat karena melibatkan perangkat daerah atau instansi lain.	ROO.27.3 1.11.81	20	Koordinasi dan tindak lanjut antarinstansi belum optimal.	Proses penerbitan izin terlambat dan pelayanan kepada pelaku usaha tidak optimal.	lebih berkolaborasi dan saling komunikasi antaran instansi terkait	Bidang Perindustrian	12 bulan
							Riisko Fraud	Penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan izin usaha industri.	ROO.27.3 1.11.82	20	pentingnya sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar tidak terjadi pembiaran terhadap usaha yang tak berijin	Izin diterbitkan tidak sesuai ketentuan dan menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat.	berkoordinasi dan bersinergi dengan pelaku usaha	Bidang Perindustrian	12 bulan
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang Terdaftar dalam SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Risiko Kebijakan	Tidak optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan SIINas dalam penyediaan data industri daerah.	ROO.27.3 1.11.85	20	Kebijakan dan koordinasi pengelolaan data industri melalui SIINas belum efektif.	Pemerintah tidak memperoleh data industri sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan	Sosialisasi kewajiban pelaku industri dalam penyampaian data industri	Bidang Perindustrian	12 Bulan
							Risiko Kepatuhan	Pelaku industri tidak melaksanakan kewajiban kepemilikan akun SIINas dan kewajiban pelaporan data industri melalui SIINas	ROO.27.3 1.11.86	21	Kurangnya pengetahuan pelaku industri tentang kewajiban kepemilikan akun SIINas dan kewajiban pelaporan data industri melalui SIINas	- Pemerintah tidak memperoleh data industri sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan - Pelaku industri tidak dapat memanfaatkan layanan fasilitas dari SIINas	Pendampingan pendaftaran akun, pengisian data dan pelaporan data industri di SIINas	Bidang Perindustrian	12 Bulan
								Manipulasi atau penyampaian data industri yang tidak akurat		20	Ketidaktepatan pengambilan kebijakan	Kebijakan tidak tepat sasaran	Analisis pengolahan data industri	Bidang Perindstrian	12 Bulan